PARTISIPASI SOSIAL & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA SUNGAI MUSI DI KOTA PALEMBANG

Oleh: Alfitri

Lektor Kepala Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya Direktur Eksekutif Kaganga Institute

Abstract

Palembang is the 17th tourism destination in Indonesia. Governments, both municipality and provincial are promoting river tourism to both domestic and foreign tourists. However, they still get some barriers in which one of them is the image of unsecurity as a tourism destination. This problem can be overcome through social participation by the residents of the city, private sector and the governments themselves as well. If this situation can be coped with, tourism sector can develop by ifself. It will give good impact to the people in terms of economic activity development.

Key word: Tourism, social participation, community development.

Pendahuluan

📆 idak bisa dipungkiri bahwa pariwisata merupakan sektor penyumbang devisa negara yang cukup besar setelah migas. Selain sebagai penyumbang devisa, sector ini juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, bahkan dibeberapa daerah seperti Bali dan Yogyakarta, sektor Pariwisata justru sebagai motor penggerak ekonomi. Oleh karena itu sangat beralasan jika daerah berlombalomba untuk mengembangkan potensi wisatanya, selain dapat mendatangkan pemasukan daerah juga bisa dijadikan sebagai sarana promosi daerah baik secara nasional maupun internasional. Salah satu daerah yang cukup gencar mengembangkan potensi wisatanya adalah Sumatera Selatan.

Setelah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata yang ke 17, daerah ini mulai melakukan pembenahan sektor pariwisata, karena memang memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan.

Akan tetapi dalam dua dekade terakhir, kunjungan wisata domestik maupun mancanegara masih sangat rendah. Hal ini disinyalir berkaitan sulitnya merubah citra rasa aman bagi publik yang berkunjung ke Sumatera Selatan yang berakibat masih minimnya wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Hambatan kultural ini tidak hanya berpengaruh terhadap sepinya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah ini, akan tetapi berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi daerah yang selama ini masih mengandalkan sumber daya alam terutama migas, dan hasil perkebunan sebagai sumber devisa. Jika sektor pariwisata dapat dibenahi, maka bukan tidak mungkin daerah ini akan mampu memberikan kontribusi bagi ekonomi daerah, sekaligus dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan sehingga bermuara kepada tingkat kesejahteraan

masyarakat.

Potensi wisata yang sedang dan akan dikembangkan saat ini adalah wisata sungai Musi yang menjadi salah satu andalan objek wisata di Sumatera Selatan, Keberadaan sungai Musi yang membelah kota Palembang menjadi sangat penting sebagai urat nadi perekonomian masyarakat sekaligus menyimpan potensi besar di bidang pariwisata. Wisata sungai yang sudah menjadi "trade mark" kota-kota besar seperti Venesia di Italia dan Bangkok di Thailand merupakan fakta bahwa sektor pariwisata merupakan sektor andalan jika dapat dibenahi dan dikembangkan. Akan tetapi dukungan potensi alam tidak cukup untuk mengembangkan suatu potensi wisata, tanpa didukung oleh peran serta masyarakat melalui partisipasi sosialnya. Artinya masyarakat akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan sektor pariwisata seperti yang dikatakan oleh Pitana dan Gayatri (2005:31) bahwa pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan, yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan sebagainya, yang merupakan objek kajian sosiologi. Partisipasi sosial akan menjadi sangat penting dalam membentuk "citra rasa aman" bagi warga kota yang bisa dijadikan daya tarik kunjungan para wisatawan ke suatu objek wisata. Selain itu peran serta pihak swasta akan dapat mendukung pengembangan pariwisata melalui investasi pembangunan objek dan sarana wisata, sehingga dapat bersinergi dengan masyarakat lokal dalam meningkatkan data tarik wisata termasuk objek pariwisata budaya.

Pariwisata budaya melibatkan masyarakat lokal secara lebih luas dan lebih intensif, karena kebudayaan yang menjadi daya tarik utama pariwisata melekat pada masyarakat itu sendiri. Semakin meningkatnya kesadaran bahwa pembangunan pariwisata tanpa pertimbangan yang matang dari aspek sosial budaya justru akan bisa membawa malapetaka bagi masyarakat, khususnya di daerah pariwisata (Pitana & Gayatri, 2005:39). Tulisan ini bertujuan mengangkat bagaimana partisipasi sosial dapat meningkatkan perannya dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah khususnya wisata sungai, sehingga secara tidak langsung diharapkan dapat mengairahkan sector ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi Sosial

artisipasi masyarakat dimanifestasikan ke dalam bentuk ikut serta menerapkan teknologi yang diperkenalkan, bayar pajak, investasi modal, dan sebagainya. Menurut Diana Conyers dalam Suparjan (2003:53) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses

persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat.

Konsep human-centered development yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan. Dalam konteks ini partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Adanya pelibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat secara aktif dimaksudkan sebagai kekuatan kontrol atas kebijakan yang diambil pemerintah daerah, sehingga yang terjadi adalah sinergi antara sumber daya lokal, kekuatan politik pemerintah dan sumberdaya modal dari investor. Mubyarto (1988:67) mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. Bintoro Tjokoroamidjojo (1988:208) mengungkapkan kaitan partisipasi dengan pembangunan sebagai berikut: Pertama, keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentu

arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kedua, keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan. Ketiga, keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif melalui perluasan kesempatankesempatan dan pembinaan tertentu.

Pendekatan partisipatif mengasumsikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci berhasilnya pembangunan. Moeljarto (1987) mengemukakan beberapa alasan pembenar bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:

- a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
- b. Partisipasi menimbulkan ras harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
- c. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat berada dan dari apa mereka miliki.
- d. Partisipasi memperluas zona (kawasan) penerimaan proyek pembangunan.
- e. Partisipasi menopang pembangunan

- f. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi baik aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
- g. Partisipasi merupakan cara efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
- h. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Partisipasi masyarakat mutlak membutuhkan identifikasi tentang kebutuhan-kebutuhan nyata masyarakat, sehingga hasil pembangunan dapat benar-benar memberikan kemanfaatan bagi mereka. Dalam konteks pembangunan pariwisata, partisipasi sosial dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan, mengingat peran masyarakat sangat dituntut dalam membentuk citra rasa aman bagi para wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata, dan tak kalah pentingnya adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam menunjang dan menjaga keberadaan objek wisata. Jika partisipasi dapat berjalan maka kehadiran para wisatawan akan berdampak pada meningkatnya kunjungan wisata yang sekaligus dalam mendorong perputaran roda perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

onsep pemberdayaan adalah

alat untuk mencapai tujuan (means to an end), untuk memperkuat kapasitas organisasi atau kelompok mereka agar mampu mengubah keadaan saat ini dan memiliki kekuatan untuk mendorong terjadinya perubahan besar yang sangat diperlukan dalam masyarakat (Roesmidi, 2006:11). Proses pemberdayaan mengharuskan pihak lain (praktisi pembangunan) memberikan kesempatan seoptimal mungkin agar setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Shardlow (dalam Rukminto, 2003:54) melihat bahwa berbagai pengertian mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas, berusaha mengkontrol

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpelihara tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang bertumpu pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah budaya.

kehidupan mereka sendiri dan

mengusahakan untuk membentuk masa

depan sesuai dengan keinginan mereka.

Model pembangunan yang bertumpu pada rakyat lebih menekankan kepada pemberdayaan (empowerment), yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan. Korten (1992:45) menyatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau rakyat (people centered development).

Pendekatan ini menyadari pentingnya potensi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan non material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Meminjam konsep Bung Karno seperti yang diungkapkan oleh Kusnaka Adimihadja (2005:403), bahwa berdikari harus dipahami sebagai upaya yang menekankan pada perbaikan nasib diri dengan mendayagunakan kekuatan sendiri, self reinforcing process, tanpa melakukan isolasi diri. Dalam konteks ini berarti diperlukan intervensi sosial dalam membangun proses kesadaran masyarakat, terutama dalam bentuk kesadaran kritis guna melepaskan diri dari ketergantungan terhadap kelompok tertentu yang selama ini menjadi tirani kemiskinan. Kajian tentang kesadaran kritis telah lama dilakukan oleh Paulo Freire (dalam Hikmat, 2003) dalam bukunya berjudul Pedagogy of the Oppressed, yang terkenal dengan konsep konsientisasi yang merupakan elemen antara (intervening) dalam proses pemberdayaan. Kesadaran kritis dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara melihat ke dalam diri sendiri serta

menggunakan apa yang didengar, dilihat, dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Konsientisasi merupakan suatu proses pemahaman situasi yang sedang terjadi sehubungan dengan hubungan politis, ekonomi, dan sosial.

Pengembangan Wisata Sungai

alembang sebagai ibukota provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi besar sebagai daerah tujuan wisata karena menyimpan sejarah panjang sebagai kawasan maritim pada masa lampau sebagai kota air. Sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Palembang sudah dikenal oleh masyarakat dunia sebagai pusat pengembangan agama Budha. Sebagai kerajaan yang bercorak maritim, Sriwijaya sudah meletakkan dasar perairan sebagai basis kekuatan kerajaan. Sejarah berlanjut ke zaman kesultanan Palembang yang juga memiliki karakteristik maritim. Pada masa ini banyak berdiri bangunan kesultanan di pinggir sungai seperti benteng kuto besak. mesjid Agung, yang sekarang menjadi salah satu objek wisata andalan. Pada masa kemerdekaan berbagai aktivitas pembangunan terpokus kepada pengembangan fasilitas kota, seperti jembatan Ampera sebagai hasil dari pampasan perang Jepang. Berbagai objek wisata tersebut menjadi basis pengembangan wisata sungai Musi. Beberapa objek wisata lain turut menjadi bagian yang mendukung proses pengembangan sebagai daerah tujuan wisata. Pemerintah kota telah dan akan membangun kawasan publik di pinggir sungai Musi, didirikan pula rumah rakit dan

pembenahan objek wisata pulo Kemarau, serta merencanakan mendirikan hotel Sultan sebagai pelengkap sarana pariwisata. Secara rinci keberadaan objek wisata sungai Musi dapat dilihat pada table 1.1.

Tabel 1.1 Objek Wisata Sungai di Kota Palembang

pemerintah, yaitu pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Sistem pariwisata ini secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.

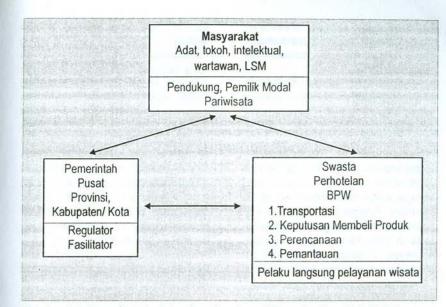
Pembenahan sistem pariwisata mutlak dilakukan untuk menjadikan Palembang

Nama Objek	WisataLokasi	Jenis Wisata
Benteng Kutobesak	Pinggir sungai Musi	Sejarah
Jembatan Ampera	Melintas sungai Musi	Sejarah
Museum Sultan Mahmud Badaruddin II	Pinggir sungai Musi	Budaya
PT. Pusri	Pinggir sungai Musi	Industri
Kampung Arab	Pinggir sungai Musi	Budaya
Pulo Kemarau	Tengah sungai Musi	Religi
Rumah Rakit	Pinggir sungai Musi	Sungai .

Sumber: Dinas Pariwisata KotaPalembang, 2005

Keberadaan berbagai objek wisata di sekitar sungai Musi menjadi tulang punggung pengembangan sistem pariwisata di kota Palembang. Dalam sistem pariwisata, ada banyak faktor yang berperan dalam menggerakkan sistem, yaitu (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Pitana dan Gayatri (2005:96) menyebut ketiga pilar tersebut sebagai tiga pilar utama insan pariwisata. Pilar pertama adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumberdaya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan. Tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media dapat juga dimasukkan dalam kelompok ini. Pilar kedua, swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan pilar ketiga kelompok sebagai salah satu kota tujuan wisata terkenal di Indonesia. Keberadaan objek wisata sungai yang harus dipertahankan dan dilestarikan, seperti kampung Arab yang merupakan salah satu situs sejarah, harus tetap dipertahankan. Wacana untuk menggusur kawasan tersebut guna kepetingan pembangunan jembatan Musi III harus dipikir kembali, sehingga tidak bertolak belakang antara pembangunan sarana dengan pengembangan program pariwisata. Begitu juga dengan pembangunan kawasan publik di Pasar 16 Ilir diharapkan masih tetap mempertahankan ciri khas pasar tradisionalnya

Tiga pilar sektor pariwisata harus secara bersamaan dikembangkan, agar memiliki kesatuan pandangan dalam pengembangan kawasan wisata sungai. Visi dan misi pembangunan pariwisata



Gambar 1. Sektor pariwisata dalam tiga pilar utama (Pitana dan Gayatri, 2005:97).

harus selaras dengan kemauan masyarakat, agar tercapai keseimbangan antara pembangunan wisata dan partisipasi masyarakat, karena antara pembangunan objek wisata dengan kemauan masyarakat memiliki hubungan yang signifikan. Wisatawan mengunjungi suatu daerah tujuan wisata antara lain didorong oleh keinginan untuk mengenal, mengetahui, atau mempelajari daerah dan kebudayaan masyarakat lokal. Selama berada di daerah tujuan wisata, wisatawan pasti berinteraksi dengan masyarakat lokal (Pitana dan Gayatri, 2005:81)

Interaksi dengan masyarakat luas ini semakin intensif kalau jenis pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata budaya, karena kebudayaan melekat pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Greenwood (1977) melihat hubungan antara wisatawan dengan masyarakat

lokal menyebabkan terjadinya proses komoditisasi dan komersialisasi dari keramahtamaan masyarakat lokal. Dengan semakin bertambahnya jumlah wisatawan, maka hubungan berubah menjadi resiprositas dalam artian ekonomi, yaitu atas dasar pembayaran, yang tidak lain daripada proses komoditisasi atau komersialisasi.

Peran Pemerintah

engembangan objek wisata bisa dilakukan dengan melibatkan kalangan swasta yang berminat mengembangkan bisnis pariwisata, khususnya wisata air di kota Palembang. Untuk mendukung perkembangan tersebut setidaknya, ada empat aspek yang perlu diperhatikan secara serius, agar tujuan pengembangan industri pariwisata dapat terwujud, yaitu pembangunan infrastruktur (fisik),

pembenahan aturan investasi, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan atau partisipasi sosial dari masyarakat kota.

Infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menunjang sarana dan prasarana wisata air, menyangkut pembangunan dermaga sungai, dibeberapa tempat yang akan dijadikan objek wisata, seperti di benteng Kuto Besak, sebagai kawasan wisata andalan, di Pulo Kemarau, sebagai objek wisata religi, di Kampung Arab, sebagai komunitas kampung wisata, di kawasan Tangga Buntung, sebagai kawasan perkampungan Palembang, serta di Pulo Kerto sebagai kawasan pedesaan di pinggiran kota. Selain pembangunan dermaga, dibutuhkan juga pembangunan penataan objek wisata yang disebutkan tadi, terutama jalan dan dan fasilitas publik lainnya.

Untuk mendukung wisata air juga diperlukan perbaikan saluran-saluran primer yang merupakan rehabilitasi anakanak sungai, yang selama ini kurang terawat dengan baik, sehingga kapalkapal kecil bisa melayari anak-anak sungai sampai masuk jauh ke tengah kota, yang merupakan ciri khas kota Palembang di masa lampau.

Pendirian rumah-rumah rakit, dan pasar terapung, merupakan syarat mutlak untuk mengembangkan objek wisata sungai. Keberadaan sarana ini akan menambah variasi bagi pengunjung untuk menikmati sungai Musi, terutama di malam hari. Rumah rakit bisa dijadikan tempat bagi para wisatawan untuk menikmati segala jenis makanan tradisional Palembang yang sangat berpariasi serta dapat mendengarkan lantunan seni daerah "batang hari sembilan" yang dikemas melalui nuansa hiburan langgam-langgam tradisional yang kesemuanya melambangkan

kejayaan seni nenek moyang di bumi Sriwijaya. Begitu juga pasar terapung dapat direkayasa sebagai bentuk aktivitas yang dinamis msyarakat di sekitar pinggiran sungai Musi. Selain sebagai sarana berinteraksi antara penjual dan pembeli, pasar terapung juga dapat dijadikan sebagai ikon pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikaitkan dengan sarana wisata sungai. Wisatawan bisa menikmati dinamika kehidupan masyarakat sekaligus dapat menjadi sumber penghasilan bagi para pemilik biduk dan sampan yang "menjual" jasanya kepada para wisatawan yang datang ke kota Palembang.

Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Kota

Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengembangan program wisata sungai. Hal ini sangat berkaitan dengan tiga hal pokok yang menjadi aspek strategis dalam pencapaian tujuan menjadikan suatu kawasan wisata yang berpotensi mengundang para wisatawan. Pertama, partisipasi masyarakat dalam menjaga rasa aman. Hal ini sangat penting dan strategis, mengingat kawasan wisata harus ditunjang oleh faktor keamanan yang kondusif, karena para wisatawan yang berkunjung akan datang dan tinggal berlama-lama jika kawasan wisata itu menjamin keamanan dan menjaga ketenteraman masyarakatnya. Dalam upaya membentuk citra rasa aman, diperlukan dukungan semua warga kota yang memiliki kemauan untuk menjaga keamanan para wisatawan dan kehidupan masyarakatnya. Citra ini harus terbentuk melalui proses yang panjang melalui partisipasi masyarakat dengan aparat keamanan agar, orang yang datang akan merasa aman jika berada di

kawasan wisata.

Kedua, partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di kawasan wisata. Potensi wisata sungai akan terjaga jika didukung oleh lingkungan yang asri dan lestari. Partisipasi dimulai dengan menjaga sungai dari tumpukan sampah. Peran masyarakat khususnya yang berada di pinggir sungai harus ditumbuhkan dalam upaya menggalang kesadaran akan lingkungan sungai yang bersih. Pemerintah kota dapat menjadikan moment pengembangan wisata sungai untuk terus mensosialisasikan mengkampanyekan gerakan kali bersih dengan terus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai ujung tombak keberhasilan program. Kemudian diteruskan dengan upaya menjaga mutu air sungai dari limpahan limbah cair yang dibuang oleh masyarakat maupun industri. Hal ini sangat penting, mengingat mutu air sungai harus dijaga pelestariannnya agar tidak tercemar, sehingga bisa mempertahankan ekologi sungai yang didalamnya akan hidup berbagai hewan yang selama ini sudah makin "terusik" karena pencemaran sungai Musi. Pemerintah kota sudah sering melakukan studi banding, khususnya ke kota Bangkok (Thailand), di mana sungainya yang jernih dan lestari dapat dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung dengan melihat ribuan ikan yang hilir mudik di sungai sebagai bentuk dari ketetanya pemerintah kota Bangkok dalam menjaga kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan sekaligus sebagai objek wisata. Pengadopsian program pembangunan dapat dijadikan langkah awal di dalam menunjang kawasan wisata sungai yang dicanangkan oleh pemerintah.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam menggerakkan perekonomian

masyarakat melalui usaha kecil dan menengah guna menunjang industri pariwisata. Peran masyarakat dalam menunjang industri pariwisata memang sudah tidak bisa dibantah. Menggeliatnya ekonomi kerakyatan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pengembangan kawasan wisata. Hubungan simbiosis mutualisma akan menjadi modal dasar dalam dalam program pengembangan, di mana masyarakat menjadi tulang punggung penggerak perekonomian. Sentra-sentra industri kerajian rakyat, baik berupa souvenir maupun makanan tradisional sudah menjadi bagian dari rantai pariwisata yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Melalui program pemberdayaan masyarakat, industri kerajinan dapat dibina sebagai basis ekonomi rakyat. Masyarakat Palembang sudah memiliki modal dasar berupa sentra kerajinan rakyat yang sudah dikenal sampai kemanca negara seperti kerajinan songket, jumputan, ukiran kayu, kain tajung, serta berbagai makanan khas palembang seperti empek-empek, burgo, lakso, celimpungan, mie celor, ragit, dan banyak lagi jenis makanan yang bisa ditawarkan sebagai variasi yang menunjang rangkaian objek wisata sungai. Semuanya itu perlu dibina dalam proses yang terus menerus agar mutu dan kualitasnya akan semakin baik dan menjadikannya sebagai ikon wisata yang dicari dan dirindukan oleh para wisatawan yang datang ke kota Palembang.

Keempat, partisipasi masyarakat dalam memberikan sebagai bentuk informasi wisata juga harus dibina, seperti para pemandu wisata yang menguasai cerita dan seluk beluk sejarah mulai dari Sriwijaya, kesultanan Palembang sampai kepada informasi mengenai objek-objek wisata yang tersebar di kota Palembang.

Sampai saat ini keberadaan pemandu wisata masih sangat terbatas, selain masih minimnya minat masyarakat menjadi pemandu wisata, juga karena minimnya institusi pendidikan yang membentuk insane sebagai pemandu wisata. Selain itu segala komponen masyarakat yang bersentuhan dengan rankaian objek wisata juga harus berpartisipasi memberikan informasi wisata. Sopir ketek, umpamanya harus menguasai informasi wisata guna menunjang keberadaan semua objek wisata dan bisa memberikan informasi pusat-pusat pelayanan wisata yang merupakan bagian penting untuk menjaga dan menciptakan citra yang ramah terhadap para wisatawan.

Penutup

engembangan objek wisata saja melakukan pembenahan terhadap berbagai objek wisata dan fasilitas wisata, namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengajak peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi sosialnya guna bersama-sama membangun citra rasa aman dan menjaga pelestarian lingkungan. Citra rasa aman menjadi sangat strategis dalam menanamkan kepercayaan terhadap para wisatawan yang berkunjung, sedangkan pelestarian lingkungan sangat dituntut untuk melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam menjaga lingkungan sungai yang jernih, asri, dan ramah lingkungan, sehingga dapat diwiujudkan suatu ekosistem sungai yang didalamnya hidup berbagai hewan air yang dapat dinikmati wisatawan.

Peran swasta juga sangat diharapkan dalam menunjang pengembangan wisata, yaitu dapat berupa pembangunan fasilitas wisata

melalui pembinaan sentra kerajinan rakyat, hotel dan restoran serta travel yang menunjang perjalanan wisata, dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran pemerintah dalam memberikan dukungan dan arah pengembangan wisata sungai sebagai objek wisata andalan. Kemauan pemerintah kota sangat dituntut, selain sebagai pendorong pengembangan sistem pariwisata, juga diharapkan sebagai pendorong bagi partisipasi masyarakat. Jika ketiga komponen tersebut dapat bersinergi, maka keunggulan objek wisata dapat dipromosikan sebagai salah satu andalan penyumbang devisa, serta imbasnya adalah bergeraknya roda ekonomi kerakyatan sebagai basis program pemberdayaan masyarakat di daerah.

Daftar Pustaka

- Adimihardja, Kusnaka. 2005. Pembangunan Berbasis Teknologi Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Masyarakat, dalam Berkarya di Belantara Budaya. C.V. Indra Prahasta: Bandung.
- Eko, Sutoro (ed), 2005. Pemberdayaan Kaum Marginal. APMD Press: Yogyakarta.
- Greenwood, D. J. 1977. Culture by the Pound. Dalam V. Smith (ed). Hosts and Guests: the Anthropology of Tourism. Philadelphia. The University of Pennsylvania.
- Hikmat, Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora: Bandung.
- Konten, D.C. dan Sjahril. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Moelyarto. 1987. Politik Pembangunan, sebuah Analisis Konsep, Arah, dan

- Strategi. PT Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Mubyarto. 2004. Teori Ekonomi dan Kemiskinan. Aditiya Media: Yoqyakarta.
- Mudiyono dkk (ed). 2005. Dimensidimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. APMD Press: Yogyakarta.
- Pitana, I Gde dan Putu G. Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata. Penerbit Andi: Yoqyakarta.
- Roesmidi dan Riza Risyanti, 2006. Pemberdayaan Masyarakat. Alqolaprint Jatinangor: Bandung.

- Rukminto, Adi Isbandi. 2003.

 Pemberdayaan, Pengembangan

 Masyarakat dan Intervensi

 Komunitas. Lembaga Penerbit

 Fakultas Ekonomi Universitas
 Indonesia: Jakarta.
- Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003.

 Pengembangan Masyarakat, dari
 Pembangan nan Sampai
 Pemberdayaan. Aditya Media:
 Yogyakarta.